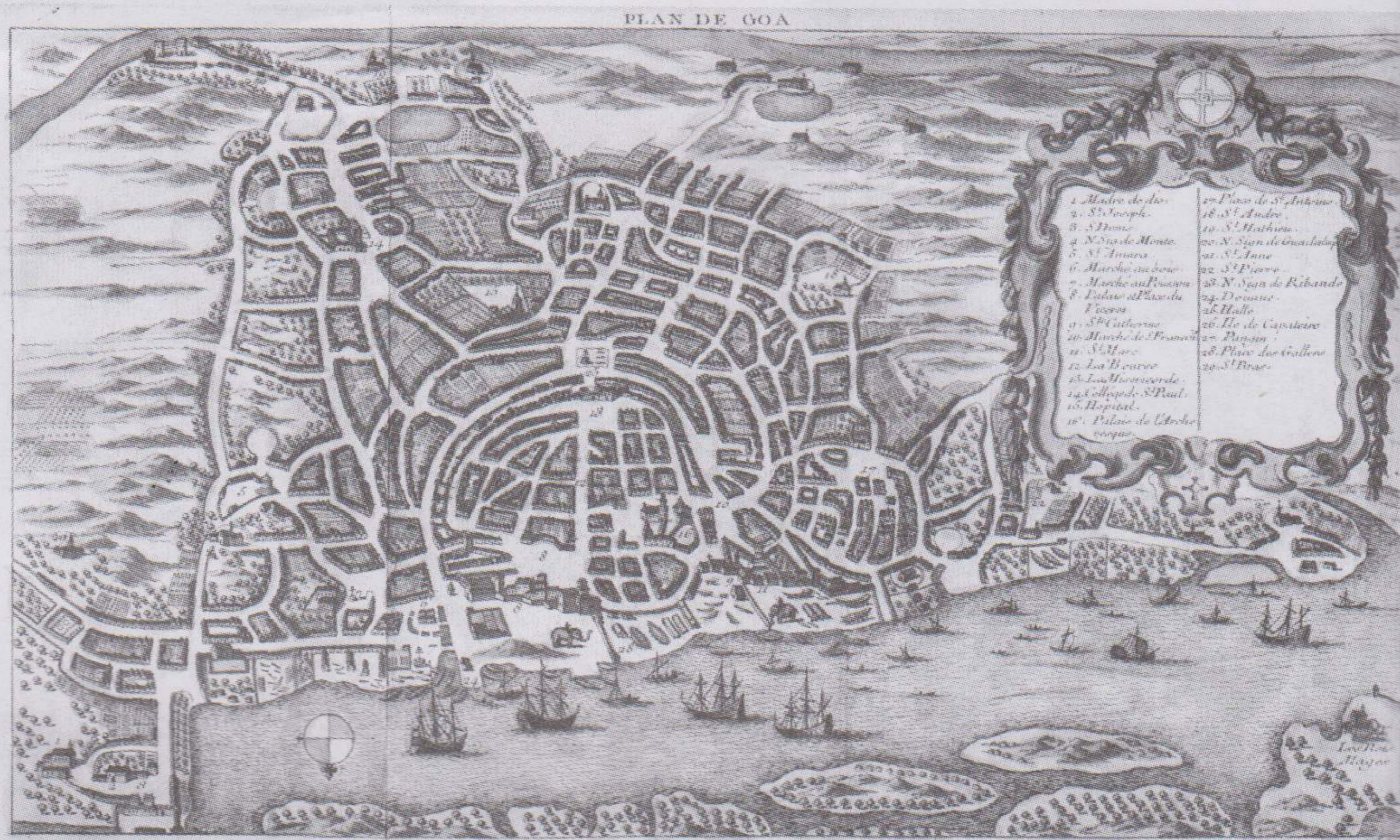


Kekatolikan di Nusantara lahir di Kepulauan Maluku. Kawasan Moro menjadi tempat pertama munculnya komunitas orang-orang Katolik pribumi, tepatnya pada tahun 1534. Dalam laporannya pada tahun 1558, Pater Antonio Marta, SJ melaporkan bahwa terdapat 88.000 umat Katolik di Moro, suatu angka yang sangat fantastis untuk waktu itu. Mereka tersebar di 28 desa di pantai utara Halmahera dan pantai Pulau Morotai. Belum terhitung komunitas orang Katolik di Ambon, Pulau Bacan, dan pulau-pulau lain.

Meski dari segi angka sangat menjanjikan, kekatolikan di Maluku dicirikan oleh pasang surut yang sangat cair. Dinamika ini dipengaruhi oleh relasi antara otoritas Portugis yang terwakili dalam diri *Kapiten Benteng Ternate* dengan para penguasa kerajaan-kerajaan Maluku sendiri. Tidak jarang, akses ke kampung-kampung Katolik terblokir karena peperangan yang sedang berkecamuk sehingga pemeliharaan iman berjalan dengan tersendat-sendat.

Pukulan paling keras diderita oleh misi Katolik di Maluku ketika orang-orang Portugis harus meninggalkan Maluku karena kekalahan demi kekalahan yang diderita lantaran keunggulan armada Perusahaan Hindia Timur milik Belanda (VOC). Kerajaan Portugal harus menyerahkan, mula-mula, Ambon, kemudian Moro, Ternate, dan Pulau Siau.

Pada tahun 1677, misi Katolik di Maluku boleh dikatakan tamat. Orang-orang Katolik yang tersisa menghayati iman Kristiani dengan cara Protestan di bawah asuhan para pendeta Kristen Belanda di bawah VOC.



Goa, India, sebagai pusat kegiatan misi Katolik di India.

Misi Katolik di Bawah Bendera Kerajaan Sedikit Mengenal Padroado Portugis

Florentinus Suryanto Hadi, SJ

Dosen pada Prodi Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma

Mengapa ketika armada Portugis meninggalkan Maluku, para misionaris pun harus ikut-ikutan meninggalkan misi mereka? Salah satu kunci jawaban dari misteri ini adalah pada sistem yang berlaku pada waktu itu, yakni *Padroado*.

Padroado

Yang dimaksud dengan istilah *Padroado real* (*Royal Patronage*) adalah sistem pengaturan misi Katolik di mana penguasa politik memiliki hak untuk menyelenggarakan kegiatan misi dan mendirikan Gereja, serta kewajiban untuk melindungi dan memelihara Gereja yang didirikan di wilayah-wilayah yang berada di bawah lingkup kekuasaannya.

Sistem pengaturan misi ini mendasarkan diri pada sejumlah hak istimewa yang disebut *ius patronatus* (hak perlindungan/patronase) yang diberikan oleh Sri Paus kepada penguasa politik, dalam hal ini Kerajaan Portugis.

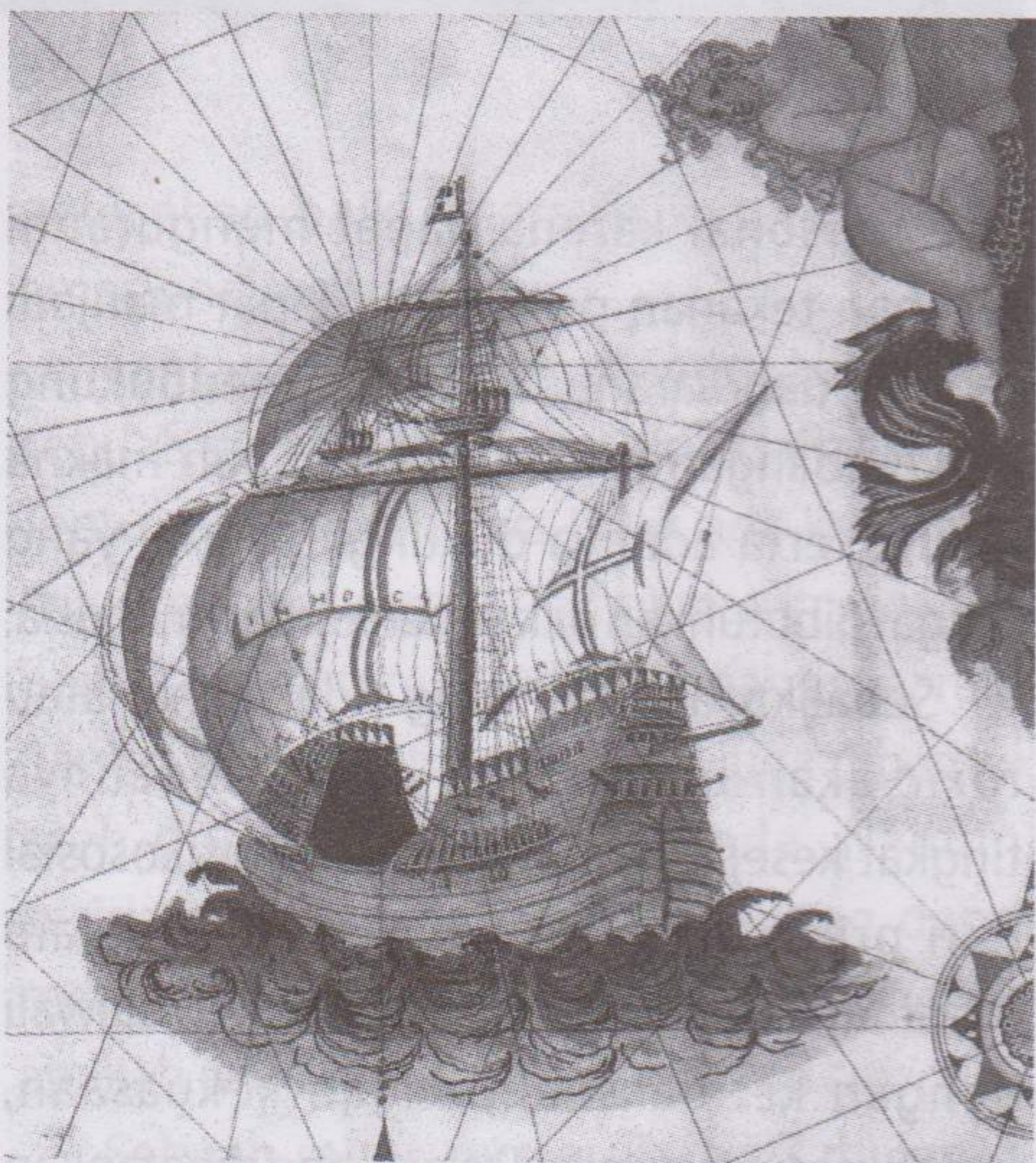
Dengan hak *Padroado*, Kerajaan Portugal memegang wewenang untuk mengirim misionaris ke tanah jajahannya, untuk mendirikan gereja, biara, dan memilih para pemangku jabatan Gereja, termasuk uskup, kepala biara, dan para pastor paroki. Sebagai konsekuensi dari wewenang tersebut, Kerajaan Portugal memikul kewajiban sebagai penanggung jawab atas semua biaya kegiatan keagamaan dan lembaga gerejawi di bawah yurisdiksinya.

Dengan sistem ini, semua uskup, imam dan seluruh misionaris menerima pengangkatan hanya atas persetujuan dari raja Portugal. Dalam perkara keuangan dan harta benda, gereja-gereja sepenuhnya bergantung pada dukungan Kerajaan Portugal. Para misionaris yang dikirim oleh ordo-ordo, meskipun bukan berkebangsaan Portugis, mesti memiliki ikatan dengan ordo yang memiliki cabang di Portugal. Mereka juga harus berangkat dari pelabuhan-pelabuhan Portugal dengan kapal yang mengusung bendera Portugis.

Restu Sri Paus

Padroado bertumpu pada serangkaian dokumen-dokumen kepausan yang berisi penganugerahan hak istimewa kepada para penguasa Kerajaan Portugal. Paus Martinus V pada tahun 1418, misalnya, memberi restu kepada bangsa Portugis untuk melakukan sebetulnya "perang salib baru", yakni perlawanan terhadap orang-orang Moor di Ceuta, Afrika Utara, dan mengizinkan pendirian Gereja di sana.

Keputusan Paus Martinus V ini kiranya merupakan salah satu titik awal praktik *Padroado*. Istilah *ius patronatus* (hak perlindungan) sendiri baru muncul secara eksplisit pada tahun 1442 dalam *bullae* Paus Eugenius IV yang mengukuhkan wewenang kepada *Ordo Ksatria Kristus*, yang berada di bawah asuhan Pangeran Henri dari Portugal, untuk mengelola organisasi Gerejani pada semua daerah taklukan dan wilayah-wilayah lain.



Kapal Portugis ber lambang Ordo Ksatria Kristus.



Paus Martinus V. Merestui "perang salib baru".

Foto-foto: worldhistory.org

Pada tahun 1452, melalui dekret kepausan *Dum Diversas*, Paus Nikolas V (1447-1455) merestui eksplorasi maritim Portugal dan memberi kewenangan untuk menundukkan kaum Saracen dan bangsa-bangsa kafir. Paus Nikolas V juga mengeluarkan surat edaran *Romanus Pontifex* yang menganugerahkan wewenang kepada Kerajaan Portugal "di provinsi-provinsi, pulau-pulau, dan tempat-tempat yang telah ditemukan, dan yang akan diduduki, dapat mendirikan dan [...] membangun gereja, biara, atau tempat-tempat saleh lainnya".

Selain memberi wewenang mendirikan gereja, Paus juga memberi hak kepada raja Portugal untuk "mengirimkan ke tempat-tempat itu orang-orang gerejawi siapa pun, sebagai sukarelawan, baik [para imam] sekuler, maupun religius dari salah satu ordo saudara dina, tentu saja atas izin dari pembesar mereka [...]".

Lingkup kewenangan yang diberikan kepausan kepada Kerajaan Portugal makin luas. Bukan hanya mendirikan gereja dan membangun infrastruktur serta mengirimkan tenaga-tenaga untuk karya misi, pada tahun 1500 Raja Manuel (1492-1521) mendapat izin untuk menugasi seorang delegat yang memiliki wewenang layaknya seorang uskup.

Perkembangan lebih lanjut

Pada tahun 1513, Keuskupan Funchal didirikan, dengan yurisdiksi mencakup seluruh wilayah Portugis di Afrika, Brazil, dan seluruh Asia. Dengan pembentukan keuskupan ini, yurisdiksi spiritual dipegang oleh uskup Funchal, di bawah *patronase* raja Portugal. Lantaran perkembangan wilayah yang semakin pesat, pada tahun 1533 status Keuskupan Funchal dinaikkan menjadi keuskupan agung, dengan empat keuskupan suffragan yang berada di bawah tanggung jawabnya: (1) Keuskupan Santiago di Cabo Verde, (2) Keuskupan São Tomé, (3) Keuskupan São Salvador de Angra, dan (4) Keuskupan Goa di India.

Gereja di Ternate yang didirikan pada tahun 1522 termasuk dalam yurisdiksi Keuskupan Goa. Pada tahun 1557, Goa dinaikkan statusnya menjadi Keuskupan Agung dengan dua Keuskupan Cochin dan Keuskupan Malaka sebagai suffragannya. Yurisdiksi Keuskupan Malaka terbentang hingga Maluku di titik paling timur dan Jepang serta Cina di utara.

Meskipun yurisdiksi spiritual Gereja di Asia, termasuk Maluku, berada di tangan seorang uskup, keseluruhan misi di wilayah jajahan Portugal tetap berada di bawah perlindungan kerajaan. Secara finansial, gereja-gereja bergantung sepenuhnya pada sokongan dan pembiayaan dari perbendaharaan kerajaan; demikian juga dengan pengiriman tenaga misionaris.

Sistem *Padroado*, dengan demikian, merupakan potret keadaan misi Gereja sampai abad ke-17, yakni ketergantungan penuh misi Katolik pada perlindungan penguasa politik. Itulah mengapa, ketika armada Portugal dan Spanyol meninggalkan kawasan Moro pada tahun 1613, para misionaris dengan berat hati,—dalam laporan Pater Andrea Simi, SJ, "dengan berlinang air mata"—juga harus meninggalkan jemaat yang sangat menjanjikan itu. ●

Bertemu
dengan-Mu

GP. SINDHUNATA, SJ

UTUSAN

DALAM SEGALA MENCARI DIA

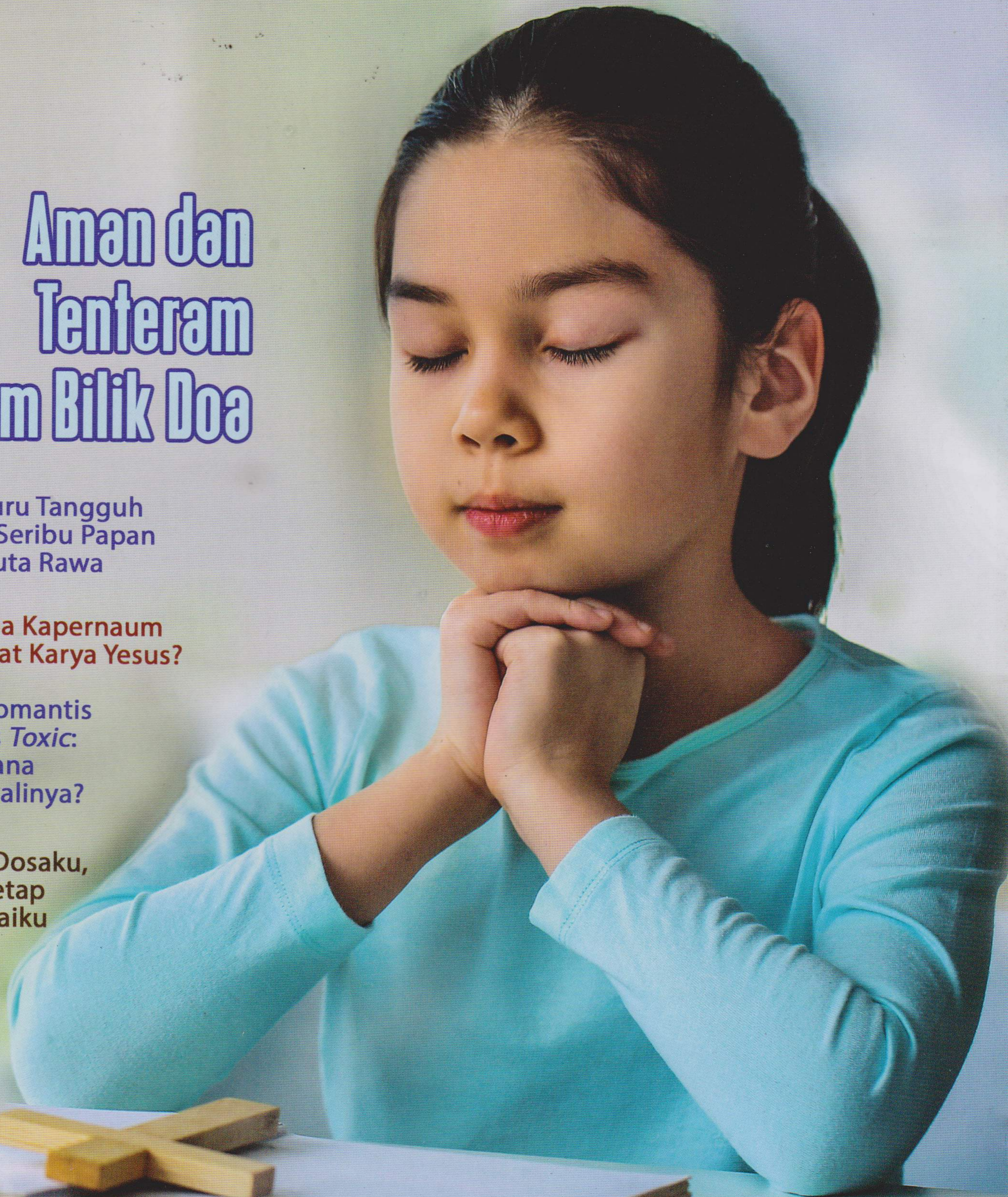
Aman dan Tenteram dalam Bilik Doa

Guru-guru Tangguh
di Kota Seribu Papan
dan Sejuta Rawa

Mengapa Kapernaum
Jadi Pusat Karya Yesus?

Relasi Romantis
Sehat vs *Toxic*:
Bagaimana
Mengenalnya?

Banyak Dosaku,
Tuhan Tetap
Mencintaiku



Rp20.000,00
(Belum termasuk ongkos kirim)

NO. 06 TAHUN KE-74, JUNI 2024
utusan.net